

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan bangsa di dalamnya yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Namun pada awal reformasi, benih-benih perpecahan etnis di daerah mulai timbul dengan latar belakang konflik kepentingan. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, yang memberikan hak kepada setiap daerah mengatur dan memberdayakan daerah masing-masing, berdampak pada kesenjangan antar daerah karena potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah berbeda baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Konflik yang berlatar belakang perbedaan etnis sudah sering terjadi pasca diberlakukannya otonomi daerah, seperti konflik Aceh, Papua dan Kalimantan. Masing-masing kelompok etnis menunjukkan rivalitasnya untuk mengedepankan kepentingan kelompoknya, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik.<sup>1</sup>

Perubahan sistem pemerintahan di tingkat lokal pasca orde baru dan kebijakan-kebijakan desentralisasi ditandai dengan mulai diterapkannya konsep *check and balances*, kekuatan politik lokal dalam lembaga-lembaga politik di daerah yang diantaranya adalah legislatif dan eksekutif. Peran dan fungsi dua lembaga tersebut menjadi lebih besar dibandingkan pada era orde baru. Dengan kata lain, desentralisasi dari dampak otonomi daerah merupakan sebuah pintu

---

<sup>1</sup> Dedi Firmansyah, *Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu tahun 2005)*. Skripsi tahun 2010 hal 1

masuk terhadap kebijakan demokrasi yang membangkitkan politik identitas untuk mendominasi etnis tertentu terhadap etnis lainnya, baik itu yang minoritas maupun mayoritas. Dalam arena politik, politik identitas direproduksi sebagai isu putra daerah yang kebanyakan dilakukan oleh elite lokal untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politiknya. Momentum reformasi telah mengantarkan para elite lokal mengkonsolidasikan kekuatan etnis untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-etnisnya sama seperti dengan adanya pembentukan daerah baru, tidak lepas dari peran elit lokal yang berupaya memisahkan atau melepaskan diri dari kabupaten induknya dengan alasan distingsi sejarah kebudayaan, agama, dan etnisitas.<sup>2</sup>

Politik identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging*<sup>3</sup> tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain.<sup>4</sup> Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Politik identitas dianggap dapat merepresentasikan kemanusiaan melalui penggambarannya akan individu terhadap individu lainnya. Oleh sebab itu politik identitas diklaim bergulir secara universal dan merupakan bagian dari politik kebudayaan.

---

<sup>2</sup> Irfan Zharfandy, *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013* Skripsi Tahun 2016 hal 1

<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan *belonging* adalah suatu keadaan dimana seseorang merasa memiliki sesuatu, sehingga dengan perasaan memiliki itu dia akan dengan sepenuh hati menjaga, mencintai, melindungi dan peduli dengan sesuatu tersebut.

<sup>4</sup> Irfan Zharfandy, *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013* Skripsi Tahun 2016 diakses pada tanggal 8 April 2019

Beberapa wacana yang biasanya menjadi bahan kajian politik identitas adalah gender, agama dan bahasa, ras dan etnis. Wacana-wacana tersebut, seperti diketahui memiliki basis pembeda yang sangat jelas sekaligus memiliki kecenderungan yang besar juga untuk dimanfaatkan oleh suatu kelompok kepentingan atau wacana dominan. Namun dalam hal ini penulis akan meneliti pada ruang lingkup identitas pada etnis. Etnis atau ethnic yang dapat diartikan sebagai kesukuan atau group suku bangsa. Sedangkan dari segi bahasa Yunani, *ethnos* turunan dari kata *ethnikos*, yang berarti penyembah berhala (*heathen*).

Dikaitkan dengan kasus Yunani, penyebutan etnis ini ditujukan bagi mereka “yang lain”, mereka yang berada di luar polis (negara/bangsa) atau mereka yang disebut *barbaros* (sekumpulan orang-orang yang kejam).<sup>5</sup> Etnis dalam beberapa fenomena-fenomenanya menjadi problem krusial yang mendorong terciptanya kekerasan di tingkat massa dan mobilisasi massa melalui peran etnis sebagai politik identitas. Problem ini cenderung menunjuk suku asli dan mereka yang ada di masyarakat, termasuk adanya anggapan bahwa ada satu kelompok yang lebih mendominasi dibanding kelompok dari etnis lain. Biasanya, yang superior ini menganggap dirinya memiliki hak lebih untuk menentukan garis hidup kelompok yang dianggap inferior.

---

<sup>5</sup> Cin Pratipa Hapsarin, Politik Identitas: Geliat Sosial Antara Aku dan Yang Lain, [http://www.academia.edu/4654898/politik\\_identitas](http://www.academia.edu/4654898/politik_identitas), diakses pada tanggal 5 juli 2019

Etnisitas merupakan simbol identitas yang kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi. Terdapat dua argumen dasar yang melandasi hal ini: pertama, setiap pemilihan pemimpin seperti pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan dalam lima tahun sekali, isu tentang asal etnis (geopolitik) kandidat tidak akan terlepas dari kerangka pertarungan politik antara kandidat. Kedua, penguasaan dan akses terhadap aset-aset ekonomi oleh entitas sosial tertentu, juga tidak pernah lepas dari bahan pembicaraan dari para kalangan intelektual sosial dan politikus sampai kepada masyarakat biasa.<sup>6</sup>

Politik identitas dianggap dapat merepresentasikan kemanusiaan melalui penggambarannya akan individu terhadap individu lainnya. Oleh sebab itu politik identitas diklaim bergulir secara universal dan merupakan bagian dari politik kebudayaan. Atau, mengutip Agnes Heller, politik identitas merupakan “Konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori utama”.<sup>7</sup> Secara positif, politik identitas memberi sinyal keterbukaan, ruang kebebasan ide, terutama setelah kegagalan narasi besar (grand narrative) untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Mujahidin Fahmid, *Identitas Dalam Kekuasaan*. (2012), h. 1

<sup>7</sup> Cin Pratipa Hapsarin, *Ibid* h 4

<sup>8</sup> *Ibid* h 4

Di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnis ras, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.<sup>9</sup>

Berbicara tentang identitas dalam kehidupan politik ada beberapa penelitian terdahulu yang berbicara tentang politik identitas seperti penelitian dari Eunjung Choi dan Jeong Seok Woo<sup>10</sup>, Silviu Petru dan Grecu<sup>11</sup>, Thomas Denk<sup>12</sup> dan Oana Andrea dan Ghita Phirnuta<sup>13</sup> yang memiliki fokus penelitian terhadap keadaan masyarakat serta pengelompokan etnis dalam kehidupan politik di suatu negara. Khusus untuk peneliti Indonesia, penelitian tentang etnisitas dalam

---

<sup>9</sup> Ahmad syafi maarif. *Politik identitas dan masa depan pluralisme Indonesia*. Hal 3

<sup>10</sup> Penelitian tentang Warisan dan Makna Konfusianisme. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa diakses, Eunjung Choi dan Jongseok Woo. Warisan dan Makna Konfusianisme. *Jurnal Internasional Korea Observer* 201 Vol 49 No 3 Hal 493-513

<sup>11</sup> Penelitian tentang Budaya Politik dan Perkembangan Demokratis di Eropa Timur. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa diakses, Silviu Petru dan Grecu. *Budaya Politik dan Perkembangan Demokratis di Eropa Timur*. *Jurnal Politik Internasional Institut Eropa Timur dan Tengah* 2015 Vol 40 No 1

<sup>12</sup> Penelitian tentang Komposisi Budaya politik Sebuah Studi Dari 25 Demokrasi di eropa. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa diakses Thomas denk, Henrik Serup Chistenses, dan Daniel bergh. *Komposisi Budaya politik Sebuah Studi Dari 25 Demokrasi di eropa*. *Journal Studi dalam pengembangan internasional komparatif* 50 (3): 258-377. 2015.

<sup>13</sup> Penelitian tentang Keamanan Diberikan Sebagai Konsep Budaya: Budaya Politik Amerika. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa diakses, Oana-Andreea dan Ghita-Pirnuta. *Budaya Politik dan Keamanan Diberikan Sebagai Konsep Budaya: Budaya Politik Amerika*. *Jurnal Politik Universitas Brasov, Transylvania*, 2017 hal 75-95

kehidupan politik juga dikaji oleh, Syafrudin, Darmawan Purba<sup>14</sup>, yang menjelaskan budaya politik suatu etnis tertentu di suatu daerah.

Fokus dari penelitian terdahulu ini lebih kepada keadaan politik di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh politik identitas warga negaranya. Sedangkan pembahasan politik identitas masyarakat pada tingkat daerah yang memiliki komposisi masyarakat multietnis tidak dibahas pada penelitian-penelitian tersebut dan hal ini akan menjadi fokus penelitian ini serta merupakan kebaharuan penelitian (novelty).

## 1.2 Rumusan Masalah

Peneliti melihat kelompok masyarakat yang memiliki komposisi etnis yang beragam (multietnis) masyarakat tersebut adalah masyarakat Kota Sawahlunto, yang pada awal berdirinya Kota Sawahlunto terkenal sebagai kota tambang batubara, yang jumlah produksi batubara Kota Sawahlunto merupakan yang terbesar kedua pada Tahun 1990- an.

Kota Sawahlunto pada awalnya merupakan bagian dari kabupaten Sijunjung yang mengalami pemekaran menjadi kotamadya Sawahlunto pada Tahun 1990, Kota Sawahlunto sebelumnya berada dalam kelurahan Koto VII Kenagarian Kubang, tetapi keberadaan tambang batubara memindahkan pusat unit pemerintahan terendah mereka *aspiran controller*, wakil *controller* dari Silungkang

---

<sup>14</sup> Penelitian tentang Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa di akses Safrudin, Darmawan Purba. Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer. *Jurnal Analisis Sosial Politik*. 1 (1): 52-73. 2017.

ke Sawahlunto.<sup>15</sup> Pada Tahun 1990 kota ini mengalami perluasan wilayah dari Kecamatan Lembah Segar sebagai pusat kota lama menjadi Kecamatan Talawi dan Kecamatan Silungkang sebagai kecamatan baru yang sebelumnya berada dalam kabupaten Sijunjung. Terdapat dua identitas ganda di Kota Sawahlunto, diantaranya identitas “Kota lama” dan “kota baru”.<sup>16</sup>

“Kota lama” berada di wilayah Kecamatan Lembah Segar sebagai sebuah warisan pemerintahan kolonial Belanda, sedangkan “Kota Baru” adalah Nagari Talawi dan Nagari Silungkang sebagai wilayah hasil pemekaran kota. Nagari Silungkang adalah pusat perekonomian pada Tahun 1927, sedangkan Nagari Talawi memiliki identitas nagari yang kuat sebagai nagari tradisional di Minangkabau.<sup>17</sup> Identitas tersebut dapat dilihat dari bangunan yang menampilkan penampilan karakter masyarakat, penampilan adalah bentuk segi visual sebagai ekspresi yang bisa dilihat secara fisik. Sedangkan karakter lebih luas daripada sekedar tampilan fisik, terdapat makna yang lebih luas baik dari segi identitas sosial dan kebudayaan masyarakat. Perbedaan identitas sosial dan kebudayaan antar kota lama dengan kota baru ini dapat dilihat dari perbedaan arsitektur bangunan. Arsitektur bangunan kota lama didominasi oleh bangunan kolonialisme Belanda, sedangkan kota baru terdapat banyak bangunan gaya arsitektur tradisional

---

<sup>15</sup> Gede Budi Suprayoga, “*Identitas Kota Sawahlunto Paska Kejayaan Pertambangan Batubara*”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 19, 2008, hal 2

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid hal 8

Kondisi sosial dan budaya masyarakat kota lama yang heterogen serta diwarnai oleh pluralisme sosial dan budaya masyarakat berbeda dengan kota baru yang homogen terdiri dari etnis Minangkabau. Perkembangan kota lama berbeda dari perkembangan kota baru Sawahlunto yang identik dengan perkembangan kota-kota lain di pesisir barat Sumatera, seperti Padang yang berasal dari perkembangan etnis penduduk masyarakat asli tetapi mengalami perubahan menjadi kota setelah berinteraksi dengan pemerintahan penjajah Belanda. Namun, perkembangan kota lama Sawahlunto merupakan hasil kreasi pemerintah kolonial Belanda yang menempatkan kota ini sebagai pusat pemerintahan dari keberadaan tambang batu baru serta memadukan beragam etnis yang datang bekerja di kota tersebut serta membentuk pluralisme sosial dan budaya, seperti yang tercermin dari gaya arsitektur bangunan kota lama ini.

Kota Sawahlunto merupakan representasi kota yang tumbuh tanpa keterikatan dengan identitas lokal maupun negara, tetapi kota ini tumbuh dan berkembang dari identitas beragam suku dan bangsa yang disatukan oleh kepentingan tambang batubara.<sup>18</sup> Kota Sawahlunto merupakan areal persawahan yang digarap oleh Nagari Kubang sebagai sebuah kelompok sosial dalam masyarakat adat Nagari Minangkabau, serta diiri oleh sungai Batang Lunto. Tetapi, daerah ini berkembang menjadi kota pusat pemerintahan pemerintahan kolonial Belanda setelah ditemukannya deposit tambang batubara pada Tahun 1891 sebagai awal pertambangan batubara di daerah tersebut. Meningkatnya populasi penduduk kota ini dapat dilihat sebagai kota kedua terbesar di provinsi Sumatera

---

<sup>18</sup> Suprayoga, Op cit hal 18

Barat pada Tahun 1930, setelah mengalami perluasan menjadi 5.777 ha pada Tahun 1929 yang tidak mengalami perubahan luas wilayah sampai Tahun 1990.

Setelah kemerdekaan, kota dibagi ke dalam dua kecamatan, yaitu Kota Sawahlunto Utara (dua nagari) dan Sawahlunto Selatan (tiga nagari). Kota ini masih memiliki arti penting bagi pergerakan kemerdekaan karena menjadi pusat perakitan senjata yang berada di pabrik tambang batubara ombilin. Sejak dibukanya areal tambang batubara, penduduk Kota Sawahlunto dihuni oleh masyarakat Minangkabau (dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat) sebagai masyarakat asli dan masyarakat pendatang (Jawa, Sunda, Batak, keturunan Cina, bahkan keturunan Belanda).<sup>19</sup> Pertambangan telah menyatukan berbagai etnis tersebut yang terlihat sampai saat ini.

Sawahlunto memiliki 4 kecamatan, salah satu kecamatan yang berada di pusat administrasi Kota Sawahlunto, yaitu kecamatan Lembah Segar merupakan wilayah dengan komposisi masyarakat multietnis yang hidup rukun sejak awal masa penjajahan hingga sekarang. Etnis yang mendiami wilayah tersebut diantaranya adalah etnis Minang, Batak, Jawa dan Tionghoa, meskipun berbeda dari segi latar belakang, masyarakat disana tidak menonjolkan identitas masing-masing etnis dalam kehidupan masyarakat sosial.

---

<sup>19</sup> Suprayoga, Op cit hal 5

Dilansir dari portal berita viva.com, baru-baru ini Kota sawahlunto telah menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai kota dengan masyarakat multietnis

“Sawahlunto yang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat ini dulunya dikenal sebagai kota tambang batubara. Pemerintah Hindia Belanda membangun sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batubara di Sawahlunto. Banyaknya bangunan peninggalan Belanda membuat Kota Sawahlunto melekat dengan nama kota wisata tua yang multietnis. Bahkan sudah dinobatkan menjadi salah satu kota yang tua terbaik di Indonesia”<sup>20</sup>

Kota Sawahlunto sendiri, merupakan kota dengan angka partisipasi Pilkada tertinggi pada 10 Tahun terakhir di Sumatera Barat, dengan angka partisipasinya mencapai 77,82%.<sup>21</sup> Data pemilukada walikota Sawahlunto pada 10 Tahun terakhir, menunjukkan peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat Kota Sawahlunto. Dalam kurun waktu 5 Tahun Kota Sawahlunto mengalami kenaikan dalam penggunaan hak pilih, dimana pada Tahun 2013 sebesar 75% naik menjadi 77% pada pemilukada Tahun 2018 baru-baru ini.

**Tabel 1.1 Perolehan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 dan 2018**

No Urut	Kecamatan	Persentase Partisipasi	
		2013	2018
1.	Silungkang	74,99%	75,33%
2.	Lembah segar	72,22%	74,62%
3.	Barangin	73,01%	77,47%
4.	Talawi	82,10%	81,85%

*Sumber* : Data KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018

<sup>20</sup> Lihat <http://viva.com/sawahlunto> diakses pada tanggal 15-02-2019 pukul 19.45

<sup>21</sup> Lihat <http://padek.co.id/partisipasipemiliksawahluntotertinggi> diakses pada tanggal 15-02-2019

Dalam Pilkada yang berlangsung pada Selasa 28 Juni 2018, total pemilih yang menggunakan hak suaranya di Kota Sawahlunto adalah 35.001 dengan penyebaran suku-sukunya seperti Minang, Jawa, Batak dan Tionghoa.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil perolehan suara dari 4 kecamatan yang terdapat di di kota Sawahlunto, pasangan Deri Asta-Zohirin Sayuti memperoleh suara 16.319, disusul dengan pasangan petahana Ali Yusuf-Ismed yang mendapatkan 11.681 suara, sedangkan pasangan Fauzi Hasan-Dasrial Eri hanya memperoleh 6.659 suara.<sup>23</sup>

**Tabel 1.2 Perolehan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 di Kecamatan Lembah Segar**

No Urut	Nama	Perolehan Suara
1.	Fauzi Hasan-Dasrial Eri	1.342
2.	Ali Yusuf-Ismed	2.566
3.	Deri Asta-Zohirin	3.357

*Sumber* : Data KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018

Hal menarik yang peneliti temui pada masyarakat multietnis di Kota Sawahlunto, khususnya pada kecamatan Lembah Segar adalah bagaimana masyarakat bersama-sama melebur dalam kehidupan masyarakat sosial dan menghasilkan suatu identitas masyarakat baru dengan nama “masyarakat Tangsi”. Keanekaragaman etnisitas pada masyarakat di kecamatan lembah segar juga berdampak pada kehidupan politik masyarakat yang multietnis dalam hal pemilu khususnya Pilkada Walikota dan Wakil walikota kota Sawahlunto baru-baru ini. Dalam kajian politik identitas, pengaruh politik identitas masyarakat terhadap

<sup>22</sup> Data Kpu Kota Sawahlunto Tahun 2018

<sup>23</sup> Ibid

pemilu atau Pilkada menjadi suatu objek kajian tersendiri yang cukup menarik untuk terus diperbincangkan.

Bentuk harmonisasi kehidupan masyarakat multietnis kota Sawahlunto dengan identitas baru mereka tergambar dalam acara *makan bajamba* yang menjadi acara rutin tiap ulang tahun Kota Sawahlunto. Prosesi *makan bajamba* menjadi puncak peringatan hari jadi Kota Sawahlunto ke-130, Sabtu, 1 Desember 2018 menjadi pesta rakyat Sawahlunto. Berbagai etnis, suku, budaya dan agama melalui paguyuban paguyuban masing masing termasuk para perantau berbaur jadi satu memeriahkan hari lahirnya Sawahlunto. Diawali dengan sidang Paripurna Istimewa DPRD setempat, Ketua LKAAM membacakan napak tilas berdirinya "Kota Arang" tercinta.

Salah satu paguyuban yang terlibat dalam makan bajamba itu, yakni paguyuban Batak "Dis Ni Roha" yang setiap tahunnya ikut meramaikan tradisi tersebut. Ketua Paguyuban Batak Sawahlunto El Sihotang mengatakan keikutsertaan paguyuban merupakan bentuk kebersamaan dan kebahagiaan karena telah menjadi bagian dari sejarah dan keberagaman dikota ini. "Kecintaan kami kepada kota ini, salah satunya dengan ikut dalam setiap pembangunan dan event yang digelar oleh Pemko setempat," ujarnya. Selain itu lanjutnya, paguyuban Dis Ni Roha aktif berpartisipasi pada event Sawahlunto Multicultural Festival, yang digelar dalam menyemarakkan hari jadi Kota Sawahlunto setiap tahunnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat <https://www.harianhaluan.com/news/detail/72263/makan-bajamba-di-sawahlunto-tradisi-meyatukan-keberagaman> diakses pada tanggal 23-05-2019

Dalam hal kehidupan berpolitik, masyarakat Kota Sawahlunto memiliki keikutsertaan yang sangat aktif meskipun dalam skop terkecil pemerintahan seperti di skala rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun ada masyarakat yang berasal dari etnis yang menjadi golongan minoritas. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu ketua RW, Desa Air Dingin dengan ungkapan sebagai berikut :

“Untuk di Tangsi sini, kami kan asalnya beragam etnis, ada yang Jawa, Minang, Batak, Sunda bahkan Cina. Jadi disini kami dalam pemilihan ketua RW itu dengan cara mendatangi tiap tiap rumah dan memberikan amplop kosong per orang yang sudah ada hak pilih dalam satu rumah tersebut. Jadi misal dirumah A ada lima orang yang milih berarti lima amplop, amplop tersebut berguna untuk menampung nama dari pemilih yang dirasa cocok untuk menjadi ketua RW. Karena disini kami tidak ada calon dalam pemilihan RW, warga bebas memilih siapa saja, bahkan bisa memilih diri sendiri. Meskipun disini yang mayoritasnya adalah Jawa dan Minang, ketua RW tidak selalu orang Jawa dan Minang, etnis tidak ada pengaruhnya disini karena kami disini sudah menjadi masyarakat Tangsi.”<sup>25</sup>

Hal lain yang menjadi perhatian peneliti pada masyarakat multietnis Kota Sawahlunto dalam hal pemilu adalah tidak adanya intervensi dari tokoh masyarakat masing masing etnis dalam hal menentukan pilihan politiknya, masyarakat bebas menentukan pilihan meskipun memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan tokoh Jawa di kecamatan Lembah Segar yang bernama Tagor, dengan ungkapannya sebagai berikut;

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ketua RW 02, Desa Tangsi tanggal 24 Februari 2019 di Kecamatan Lembah Segar

“Kami disini tidak ada mengarahkan masyarakat untuk memilih calon walikota dengan melihat sukunya, warga bebas memilih pilihannya dengan pertimbangan masing-masing. Saya selaku yang dituakan disini sebagai tokoh Batak dan teman-teman dari suku lain tidak pernah melakukan ajakan kepada masyarakat untuk memilih berdasarkan kesamaan suku.”<sup>26</sup>

Interaksi masyarakat multietnis di Kota Sawahlunto tercermin dalam segala aspek bidang kehidupan sehari-hari yang menjadi hal menarik untuk diteliti lebih dalam lagi. Terutama dalam aspek kehidupan berpolitik masyarakat Kota Sawahlunto yang baru ini telah mengadakan pemilihan umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang diteliti secara rinci adalah: Bagaimana pengaruh politik identitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka fokus utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk politik identitas dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sinaga (salah satu tokoh masyarakat di kecamatan lembah segar) tanggal 23 Februari 2019 di Kecamatan Lembah Segar

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh politik identitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota Sawahlunto tahun 2018, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai politik identitas khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam Ilmu Politik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai politik identitas masyarakat.

